

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sama halnya seperti Amerika Serikat, China juga merupakan negara yang memiliki kekuatan hegemoni yang besar di dunia. Kemunculan *The Rising of China* sebagai negara hegemon dalam bidang ekonomi global menjadikan banyak pengaruh terhadap tatanan dunia. Khususnya terlihat pada masa pemerintahan *Xi Jinping* yang kini memiliki ambisi dalam meruntuhkan Amerika Serikat sebagai negara *superpower* dalam bidang ekonomi. Terlihat bahwa hingga saat ini sudah banyak sekali produk-produk serta perusahaan China yang telah beredar di sebagian besar negara dunia. Kekuatannya akan mengembangkan serta terus menyempurnakan perekonomiannya menjadikan China merupakan negara yang terbilang mapan akan hal itu. Tujuannya atas menguasai dunia melalui perdagangan serta infrastruktur yang terbilang mapan merupakan contoh China dalam mengimplementasikannya.

Seperti yang kita ketahui sampai saat ini banyak yang menggunakan produk-produk asal China dibandingkan produk asal negaranya sendiri. Karena kini produk China juga sudah mulai memiliki kualitas yang bagus dalam penggunaannya. China memiliki perilaku yang terbilang cerdas dalam memanfaatkan banyak masyarakat dunia dalam menjual produknya dengan cara-cara yang bervariasi. Terlihat kini semakin majunya dunia akibat globalisasi, semakin maju pula teknologi yang semakin modern ini menjadi salah satu cara China memperkenalkan negaranya melalui aplikasi yang sedang *trend*. Namun,

tidak hanya penyebaran melalui produknya saja, pembangunan infrastruktur juga kini banyak dilakukan oleh kerjasama China dengan negara terkait yang melakukan kerjasama.

China dapat menjadi seperti ini sejak keberhasilan kebijakan luar negerinya pada masa pemerintahan Mao Zedog. China beralih menjadi negara republik yang memiliki ideologi komunis dibawah pemerintahan Mao Zedog dan Partai Komunis China pada tahun 1949. Namun pada saat itu walaupun telah berubah kepada pemerintahan baru, China masih belum memiliki banyak relasi dengan negara-negara lain. Itu menyebabkan Mao Zedog pada masa setelah kemerdekaan China mengambil peluang-peluang dalam membangun relasi dengan banyak negara karena adanya kesempatan yang luas dan membutuhkan landasan kebijakan luar negeri nya. Dimana kebijakan luar negeri China hingga saat ini adalah cermin dari *Five Principles of Peaceful Coexistence (Zhou Enlai Peace Institute, 2013)*.

Dalam prinsip yang digunakan China dalam kebijakan luar negerinya yang berisi mengenai perdamaian dan keamanan dunia juga dimiliki oleh banyak negara lainnya, ini menjadikan panduan bagi China dalam membangun relasi dalam kerjasama secara bilateral maupun multilateral. Kebijakan luar negeri yang menjadi sebuah *highlight* saat ini yaitu sebuah kebijakan *Belt and Road Initiative (BRI)* yang merupakan strategi China dalam mengembangkan serta memperkuat perekonomian negara yang kaya dan bersanding dengan negara-negara berkembang dibawahnya (Putera et.al) melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan berserta negara yang menjadi tujuan China dengan bantuan berupa pembangunan di negara terkait.

China menjalankan suatu kebijakan diplomatik ekonomi *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan oleh Presiden China Xi Jinping di tahun 2013 dimana BRI ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan China sebelumnya yaitu *One Belt One Road* (OBOR) banyak menghasilkan kontribusi sejumlah negara juga meningkatkan kualitas kawasannya. Inisiatif yang dibuat ini memiliki tujuan dalam memperluas pengaruh serta kekuatan China. *Belt* disini merupakan istilah yang merujuk kepada rute darat dalam transportasi jalan dan kereta api sedangkan *Road* merupakan mengacu kepada rute laut.

Kebijakan ini merupakan kebijakan dengan investasi maupun bantuan dana kepada negara yang memiliki wilayah strategis dimana China menganggap kerjasama ini akan saling menguntungkan bagi kedua negara yang melakukan kerjasama dalam kebijakan BRI tersebut. Sebagai negara yang terbilang akrab dengan China kini Indonesia memiliki sebuah kerjasama bersama dengan China yang telah terlealisasikan pada 2018 lalu yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama tersebut dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas insfrastuktur di Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan atas dasar dimana China merupakan negara dengan ekspor manufaktur terbesar dan di perjual-belikan di Indonesia. Serta Indonesia yang merupakan negara partner dalam bidang ekonomi yang memiliki banyak potensi bagi China dalam upaya meningkatkan perekonomian negaranya.

Kerjasama inilah yang menjadikan negara-negara yang membutuhkan banyak biaya operasional memilih China dalam kerjasama pembangunan infrastrukturnya (Amalia, 2017). Dengan melihat bagaimana kini kondisi

perekonomiannya, China dapat dipercaya sebagai negara dengan perekonomian yang stabil akibat hegemoni dunianya yang bahkan kini telah menjadi negara yang hampir menyetarai dengan Amerika Serikat.

Kebijakan BRI yang telah banyak tersebar ini rupanya tidak hanya dapat menguntungkan bagi negara yang menjalin kerjasama tersebut, namun ada juga yang malah membuat negara tersebut semakin kesusahan dan sulit dalam melakukan pembayaran kembali terhadap China. Dimana kini dapat diketahui telah beredarnya jebakan utang yang dilakukan China kepada negara kerjasamanya yang menyebabkan pembangunan yang dilakukan kedua negara tersebut jatuh ke tangan China. Jebakan ini dikenal dengan *Debt-Trap* yang merupakan jebakan utang dalam kerjasama antar negara dimana China dapat memperoleh keuntungan jika negara peminjam tidak dapat memenuhi pinjaman yang diberi oleh China dalam kerjasama yang dilakukan.

Debt-trap ini memiliki sebuah ciri kerja dengan memberikan pinjaman berupa dana beserta bunga dalam menjalankan suatu kerja sama dengan negara peminjam dalam membangun infrastruktur. Strategi yang dilakukan China akan *debt-trap* in menempatkan suatu negara dalam kondisi yang sulit dengan tujuan memperoleh konsesi ekonomi maupun politik negara peminjam ketika negara peminjam tersebut mengalami kegagalan dalam pengembalian pinjaman. Ditambah dengan faktor dimana China menjadi sorotan akan perekonomiannya oleh negara lain (Setyanti & Mugasejati, 2018).

Pinjaman yang diberikan China terhadap negara yang membutuhkan ini tidak semata-mata hanya meminjamkan dan menggantikan, namun ini merupakan sebuah strategi China dalam memanfaatkan kerjasama tersebut untuk kepentingan

negara nya juga. Pembangunan infrastruktur yang dibuat memiliki wilayah yang strategis untuk China meningkatkan ekonomi nya.

Diplomasi yang dilakukan oleh China ini tentu menjadi keuntungan juga bagi China, dimana China dapat mengambil alih kepemilikannya atas infrastruktur negara peminjam sebagai jaminan atau balasan ketika negara tersebut tidak dapat melunasinya. Kebijakan BRI oleh China menjadikan banyak negara memiliki utang yang ternilai besar. Ini dikarenakan penyebaran diplomasi yang menjadikan perangkap utang. China memanfaatkan BRI sebagai geoekonomi yang menyebabkan negara yang bekerja sama dengan China kesulitan membayar utang dari infrastruktur yang dibuat oleh kerja sama dengan China. Hal ini menyebabkan beberapa negara tidak dapat menyanggupi untuk membayar utang dan mengharuskan mereka memberikan infrastruktur nya kepada China.

Beberapa negara yang telah terjebak dalam diplomasi yang dibuat oleh China termasuk Sri Lanka, Uganda, dan Djibouti. Dari ketigat negara ini termasuk pelabuhan, bandara, dan proyek kereta api. Namun dapat diketahui bahwa China memiliki perkembangan ekonomi yang besar menyebabkan banyak negara yang ingin bekerja sama maupun meminta bantuan terhadap China dalam menjalankan kepentingan nasionalnya.

Lebih lanjut yang terjadi di Sri Lanka, dimana negara ini merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang menjadikan negara ini banyak dikembangkan oleh pihak internasional. Letak negara yang strategis bagi jalur perdagangan yang melalui Samudera Hindia dalam akses menuju Asia Timur maupun Asia Tenggara. Ini menjadi kawasan sangat penting bagi perdagangan

internasional karena menjadi jalur sutera maritim China dan Eropa dan menjadikan Sri Lanka sebagai tempat singgah kapal-kapal perdagangan dunia.

Sri Lanka juga dikenal dengan nama *Ceylon* yang diberikan oleh kolonial Inggris pada 1948 dan menjadi Sri Lanka setelah perang di tahun 1983. Sejak kemerdekaannya, Sri Lanka menerapkan strategi serta rencana dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan pemerataan dan pembangunan sosial. Sejak dahulu, kemampuan pemerintah dalam melakukan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan sangat dibatasi oleh keterlibatan operasi pertahanan dan keamanan dari Utara dan Timur negara (*UN Department for Economic and Social Affairs, 1997*).

Namun, tidak dapat dipungkiri sebagai negara yang memiliki letak yang sangat strategis ini Sri Lanka merupakan negara yang memiliki banyak masalah keuangan. Kesulitan dalam perekonomian menyebabkan Sri Lanka sangat sulit dalam membangun infrastruktur di negaranya dan menjadikan negara ini meminta banyak bala bantuan keuangan baik IMF maupun *World Bank*. Banyaknya pinjaman yang digunakan ini menyebabkan Sri Lanka terus menerus terlilit dalam utang luar negeri yang sangat banyak. Utang yang terus bertambah menjadikan Sri Lanka semakin sulit untuk melunasinya, jika utang semakin banyak ini dapat menyebabkan kegagalan dalam melunasi utang dan membuat negara terjebak dalam krisis ekonomi.

Krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka sudah berlangsung sejak lama yang menjadikan Sri Lanka sangat membutuhkan bantuan untuk menstabilkan perekonomian di negaranya. Jika melihat kebelakang, krisis yang terjadi di Sri Lanka ini disebabkan karena negara ini memiliki banyak ketergantungan terhadap

negara lain. Termasuk dalam kepentingannya terhadap impor yang menjadi salah satu penyebab Sri Lanka mengalami krisis. Ini menjadikan Sri Lanka membutuhkan negara lain dalam upaya mengeluarkan Sri Lanka dari krisis ekonominya. Dengan upaya yang dilakukan oleh Sri Lanka dalam menyelesaikan krisis ekonominya, Sri Lanka kemudian menjadikan China sebagai negara yang dipercaya Sri Lanka dalam menyelesaikan krisis ekonominya. Namun disisi lain, China pun melihat bahwa Sri Lanka memiliki wilayah sebagai penghubung yang sangat penting dalam pembangunan *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadikan China membantu dalam pembangunan infrastuktur di Sri Lanka termasuk pelabuhan, bandar udara, jalan tol, dan pembangkit listrik.

Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dengan kerja sama China dalam membangun pelabuhan Hambantota (Moramudali, 2019) dimana pembangunan ini dimulai sejak tahun 2007. Sebagai negara yang berkembang, Sri Lanka tentu saja memerlukan bantuan hingga pinjaman dana dari negara maju untuk mendukung fasilitas di dalam negaranya. Dalam hal ini terlihat bahwa China sebagai negara yang memiliki wajah ekonomi di dunia ini menjadi sebuah negara yang menjadi kepercayaan Sri Lanka untuk meminta tolong untuk mengeluarkan Sri Lanka dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Pembangunan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka dengan letak pelabuhan yang strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Perera, 2016) menjadikan pembangunan ini memiliki tujuan khusus dalam kepentingannya melakukan ekspor dan impor untuk menambah penghasilan dalam negerinya. Namun, dapat diingat juga bahwa China memberikan bantuan ini karena adanya kepentingan sebagai modal China dalam meningkatkan perekonomian di

negaranya karena BRI yang dibuat oleh China ini memiliki peran dalam memaksimalkan perusahaan-perusahaan China dalam meningkatkan perekonomiannya secara internasional.

Dapat diketahui bahwa China telah memberikan pinjaman kepada Sri Lanka dalam pembangunan pelabuhan Hambantota yang terletak di pantai selatan pulau Samudra Hindia, dimana dalam pinjaman tersebut China memiliki saham di dalamnya atas pelabuhan yang dibangun tersebut. Ini menjadikan Sri Lanka merupakan negara penerima bantuan terbesar ketiga selama *Belt and Road Initiative* dijalankan setelah Pakistan dan Rusia. Pinjaman yang tergolong besar ini dibuat oleh Mahinda Rajapaksa sebagai kepala negara dalam mewujudkan kepentingan negara demi masyarakat pada aspek ekonomi karena sejak lama Sri Lanka telah mengalami kesulitan terhadap perekonomian yang menjadikan banyak usaha pemerintahan Sri Lanka dalam mewujudkan stabilnya perekonomian di negaranya.

Kerjasama yang dilakukan oleh Sri Lanka ini tidak memiliki buah hasil yang bagus bagi negaranya. Kerjasama ini dianggap membuat negara tersebut malah semakin kesulitan dan semakin parah. Yang seharusnya membantu memperbaiki perekonomian dan mengeluarkan negara dari krisis malah membuat bertambahnya utang luar negerinya. Ini terjadi karena besarnya bunga yang diberikan China terhadap pembangunan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka yang menyebabkan Sri Lanka tidak mampu melunasinya. Kerjasama ini membuat China lebih banyak diuntungkan dibanding dengan negara yang dipinjaminya.

Proyek yang menjadi banyak perhatian karena adanya fenomena *debt-trap* yang terjadi di Sri Lanka karena pengambilan alih pelabuhan Hambantota oleh

pemerintahan China di tahun 2017. Akusisi pelabuhan Hambantota oleh pihak China karena Sri Lanka yang mengalami kesulitan dalam melunasi utang nya terhadap China. Pelabuhan yang dijadikan salah satu pelabuhan besar penghubung Asia Barat dan Eropa menjadikan pemerintah Sri Lanka memberanikan diri dalam mengambil keputusan pembangunan infrastruktur ini melalui bantuan China. Ini dilakukan karena tujuan utama pemerintah Sri Lanka dalam memakmurkan masyarakat Sri Lanka dan terbebas dari krisis ekonomi berkepanjangan.

Dalam realisasi nya, pelabuhan Hambantota ini terhambat karena hanya menghasilkan sedikit laba yang menjadi sedikitnya keuntungan yang didapatkan oleh Sri Lanka dan menjadikan kesulitan dalam melunasi pinjaman. Setelah pemerintah Sri Lanka melihat keuntungan dari pembangunan pelabuhan Hambantota yang kecil ini mengharuskan pemerintah melakukan negosiasi pada pemerintah China. Pada tahun 2017, negosiasi yang diajukan oleh Sri Lanka ini disepakati bahwa China memiliki hak kelola atas pelabuhan tersebut. Tidak hanya pelabuhan saja yang diambil oleh China namun area pelabuhan yang dibangun tersebut juga diambil karena merupakan area yang luas untuk China menjadikan sumber maupun tempat dalam melakukan investasi yang besar (Behuria, 2018).

Dari negosiasi yang di ajukan oleh Sri Lanka ini menjadikan China memiliki kuasa atas pelabuhan Hambantota dengan kurun waktu yang cukup lama yakni selama 99 tahun. Adanya kekuasaan China dalam pelabuhan Hambantota selama 99 tahun ini yang terhitung mulai dari 2017 secara tidak langsung menyebabkan Sri Lanka terjebak dalam utang pinjaman yang ternilai sangat besar terhadap China dan membebani kondisi ekonomi Sri Lanka. Beban ekonomi yang terjadi di Sri Lanka ini dapat menjadikan Sri Lanka semakin terjerumus akan

krisis ekonomi di negaranya. Dalam data yang tersimpan dalam *index of economic freedom*, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Sri Lanka melambat sejak 2017 hingga 2019, memburuk di tahun 2020 dan mulai bangkit kembali di tahun 2021 (*index of economic freedom, 2022*). Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **IMPLIKASI *DEBT-TRAP* CHINA TERHADAP KERJA SAMA PEMBANGUNAN PELABUHAN HAMBANTOTA DI SRI LANKA.**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Sri Lanka dengan bantuan dari China ini menyebabkan perekonomian yang dimiliki oleh Sri Lanka semakin terganggu. Terjebaknya Sri Lanka oleh *Debt-Trap* China merupakan inti dari permasalahan ekonomi Sri Lanka menurun, China yang memiliki tujuan membentuk kerja sama untuk membangun ekonominya sendiri menjadikan kerja sama ini menjadi sebuah peluang bagi China dalam mendapatkan keuntungan. Sedangkan Sri Lanka yang memiliki tujuan kerja sama sebagai peluang untuk menstabilkan serta mengembangkan perekonomian negara ini menjadikan kerugian bagi Sri Lanka dikarenakan jatuhnya Pelabuhan yang dibuat atas kerja sama kedua negara sebagai kini telah di akuisisi oleh negara yang membantunya, yaitu China. Maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana *debt-trap* China dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Sri Lanka melalui kerjasama dalam pembangunan (Pelabuhan Hambantota) ?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Penulis menyimpulkan bahwa objek dari fokus penelitian ini bahwa datangnya *debt-trap* China di Sri Lanka ini menyebabkan stabilitas ekonomi di Sri Lanka semakin terganggu akibat adanya sebuah kerjasama dalam pembangunan Pelabuhan Hambantota bersama dengan China.

Pembatasan masalah yang dilakukan penulis yaitu mengenai pengaruh *debt trap* yang diberikan China kepada Sri Lanka yang menyebabkan stabilitas perekonomian Sri Lanka yang terus terganggu dalam rentang tahun 2017-2021. Serta dengan menyertakan bagaimana kondisi perekonomian negara Sri Lanka dalam rentang tahun tersebut sejak China memiliki peran terhadap pembangunan kerjasama di Sri Lanka.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi *debt-trap* China.
2. Untuk mengetahui keadaan ekonomi Sri Lanka sebelum hingga sesudah China berperan dalam pembangunan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai Implikasi *Debt-Trap* China terhadap Kerjasama Pembangunan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta penulis dalam mengetahui salah satu faktor penyebab Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi.
3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.